

Analisis Tingkat Efisiensi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA)

Umi Rachmah Damayanti

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru
umi.rachma.damayanti@uin-suska.ac.id

Abstract

Microfinance institutions is one of the pillars in the financial intermediation process. The potential and opportunities that so great on the SMEC has been attracting the business of microfinance with wonderful, even the realm of social empowerment microfinance lately has been transformed into the microfinance business with commercial. Map of the competition strict automatic this will bring consequences of the microfinance business changed. Given the role of Islamic microfinance institutions (LKMS) is enormous in encouraging the development of micro enterprises, then the existence of LKMS need to remain guarded and enhanced performance. This research aims to know how does the level of efficiency of LKMS performance and efficiency improvement measures LKMS. The method of DEA (Data Envelopment Analysis) used to measure efficiency and identify measures to increase the efficiency of LKMS. The results of the research there is a finding that LKMS have a value score efficiency below 1, meaning the institutions in conducting his business inefficient. The cause of the occurrence of LKMS [there is the magnitude of the burden of input that are not offset with the output generated.

Keywords: Microfinance, Efficiency, DEA

Abstrak

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan. Potensi dan peluang yang demikian besar pada UMKM ini telah menarik minat bisnis keuangan mikro dengan luar biasa, bahkan ranah social pemberdayaan keuangan mikro belakangan ini telah menjelma menjadi bisnis keuangan mikro dengan komersialisasinya. Peta persaingan yang semakin ketat ini otomatis akan membawa konsekuensi bisnis keuangan mikro berubah total. Mengingat peran dari Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat besar dalam mendorong berkembangnya usaha mikro, maka keberadaan LKMS perlu tetap dijaga dan ditingkatkan kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanana tingkat efisiensi kinerja LKMS dan langkah-langkah perbaikan efisiensi LKMS. Metode DEA (Data Envelopment Analysis) digunakan untuk mengukur efisiensi dan mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan efisiensi LKMS. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat LKMS yang memiliki nilai skor efisiensi di bawah 1, yang berarti lembaga tersebut dalam menjalankan usahanya tidak efisien. Penyebab terjadinya [ada LKMS adalah besarnya beban input yang tidak diimbangi dengan output yang dihasilkan.

Kata Kunci: Keuangan Mikro, Efisiensi, DEA

Pendahuluan

Salah satu sektor ekonomi yang banyak mencuri perhatian saat ini adalah sektor keuangan mikro. Istilah keuangan mikro secara umum menjelaskan tentang penawaran layanan keuangan sederhana (biasanya simpanan dan pembiayaan) kepada klien berpenghasilan rendah maupun yang tidak berpenghasilan sama sekali. *Microfinance* atau pembiayaan mikro mengalami perkembangan yang sangat pesat dua dasawarsa terakhir. Sejak keberhasilan program *Grameen Bank* yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun 2006) di Bangladesh pada awal tahun 1980, institusi keuangan dunia mulai menaruh perhatian yang besar kepada pembiayaan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dan juga memperoleh keuntungan.

Keuangan mikro sendiri telah berkembang semenjak awal berdirinya di tahun 1980-an menjadi sebuah industri besar yang dalam perkembangannya menarik perhatian dari praktisi, investor, dan masyarakat. Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan. Keuangan mikro dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka. Peningkatan sektor keuangan mikro ini telah terbukti mampu menyediakan layanan jasa keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Ketersediaan lembaga keuangan mikro (LKM) diharapkan mampu untuk mencakup dua profil, antara institusi sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin tanpa memandang *bankable* atau tidak, dan institusi komersial yang memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam penyaluran dana keuangannya.

Meski berperan sebagai institusi sosial, tetapi Lembaga Keuangan Mikro dapat menjadi institusi komersial melalui cara meminimalkan biaya transaksi, dan berperan dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam mengkoordinir anggotanya. Karena kedekatan dengan pihak nasabah dan fleksibilitas aturan, maka biaya-biaya dapat berkurang. Kemudian peran dari KSM diharapkan mampu menekan anggotanya dalam mengamankan pembiayaan, atau penyubstitusi *collateral*. Luhurnya misi Lembaga Keuangan Mikro tersebut sejalan dengan misi ekonomi syariah yang bertujuan membangun perekonomian yang beretika dan berperikemanusiaan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu pemberdayaan ekonomi umat.

Ruang lingkup pemberdayaan ekonomi ini tidak terlepas dari isu-isu tentang kemiskinan, termasuk di dalamnya adalah akses permodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Isu UMKM sendiri adalah isu strategis pembangunan nasional, di samping jumlah pelaku dan penyerapan tenaga kerja, UMKM sangat terkait dalam perwujudan ketahanan ekonomi nasional dari berbagai dimensi. Meskipun Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah secara teori sama-sama bergerak di sektor ekonomi mikro yang sarat dengan pemberdayaan, namun pada tataran praktisnya terdapat perbedaan yang cukup diametrial antara kedua lembaga tersebut. Perbedaan tersebut berada pada intensitas porsi pemberdayaan dan komersial yang dilakoni masing-masing.

Potensi dan peluang yang demikian besar pada UMKM ini telah menarik minat bisnis keuangan mikro dengan luar biasa, bahkan ranah sosial pemberdayaan keuangan mikro belakangan ini telah menjelma menjadi bisnis keuangan mikro dengan komersialisasinya. Praktek komersialisasi keuangan mikro yang awalnya sarat dengan misi pemberdayaan ini bahkan tidak saja dilakukan oleh lembaga perbankan, baik bank lokal maupun bank asing, tetapi lembaga non bank seperti pegadaian, modal ventura, permodalan nasional madani dan lain-lainnya, juga telah serius dan secara besar besaran menggarap ranah bisnis keuangan mikro.

Peta persaingan yang semakin ketat ini otomatis akan membawa konsekuensi bisnis keuangan mikro berubah total. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia berpotensi besar dalam mewujudkan sektor UMKM yang kuat. Hal ini dikarenakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki karakteristik yang berkesesuaian dengan sektor usaha UMKM, dimana target dan sasaran dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah serta skala usahanya berorientasi kepada sektor mikro. Namun demikian, secara umum kondisi dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah masih belum dapat berjalan secara ideal. Sebagai salah satu contoh bentuk dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang paling sederhana, Gampito (2008) mengatakan, keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia tidak didukung oleh manajemen yang profesional yang memungkinkan Baitul Maal Wat Tamwil *sustain* dan berjalan dengan baik. Beberapa penyebab tidak *sustain*-nya Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia adalah manajemen yang buruk, pengelola yang tidak amanah, sumber daya manusia yang tidak mampu bekerja

secara profesional, tidak dapat menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan seterusnya. (Sumiyanto, 2008).

Mengingat peran dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah sangat besar dalam mendorong berkembangnya usaha mikro, maka keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah perlu tetap dijaga dan ditingkatkan kinerjanya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran efisiensi kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah serta melakukan perencanaan strategi yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah sehingga Lembaga Keuangan Mikro Syariah mampu memiliki daya saing dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hadirnya para pemain baru dalam sektor ekonomi mikro di Indonesia, yang cenderung lebih *powerfull*, telah mengubah total peta bisnis keuangan mikro. Komersialisasi yang mereka lancarkan tidak mampu diimbangi oleh pemain-pemain kecil yang komit mensinergikan dual *profilenya*. Dalam konteks ini, sinergisitas dua *profile* Lembaga Keuangan Mikro Syariah dipertaruhkan dan terancam terdisintegrasi untuk kemudian saling berdiri sendiri pada kutub yang berbeda, antara komersialisasi dan pemberdayaan. Aliran komersialisasi pada dimensi tertentu masih mengklaim menawarkan gagasan pemberdayaan, dengan syarat Lembaga Keuangan Mikro Syariah melakukan reformasi pada dimensi profesionalitas, teknologi, dan modal, sebagai upaya mengimbangi pemain-pemain besar. Sementara aliran pemberdayaan sepenuhnya mendorong terjadinya purifikasi ke arah pemberdayaan itu sendiri. Paradoks itu dicoba dimoderasi dan dinetralisir dengan adanya tata kelola yang baik (*good governance*), daripada membenturkan dua aliran tersebut. Pendekatan komersialisasi, pendekatan sosial, serta tata kelola yang baik (*good governance*) akan dijadikan pertimbangan untuk memberikan solusi serta langkah-langkah strategis penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam memperkuat posisinya dalam menghadapi praktek komersialisasi oleh bank-bank besar di tanah air, sekaligus mampu mengukuhkan peran strategisnya dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Kajian Pustaka

a. Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah entitas bisnis. Konsep efisiensi seringkali didefinisikan sebagai melakukan sesuatu secara benar (*doing the thing right*). Hal ini biasanya selalu dikaitkan dengan bagaimana cara perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, konsep efisiensi seringkali dilihat dari sisi biaya. Perusahaan selalu berusaha agar tingkat biaya ditekan sampai pada level seminimal mungkin untuk menghasilkan tingkat *output* yang diinginkan dalam proses transformasi dari *input* menjadi *output* (Nurhandini, 2006). Prasetyo (2007) mengatakan bahwa dalam sudut pandang perusahaan dikenal tiga macam efisiensi, yaitu:

1. *Technical Efficiency* yang merefleksikan kemampuan perusahaan untuk mencapai level *output* yang optimal dengan menggunakan tingkat *input* tertentu.
2. *Allocative Efficiency*, merefleksikan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan *input*nya dengan struktur harga dan teknologinya.
3. *Economic Efficiency*, yaitu kombinasi antara efisiensi teknis dan efisiensi alokatif.

b. Efisiensi Pada Lembaga Keuangan

Menurut Ascarya (Ascarya & Yumanita, 2006) konsep-konsep yang digunakan dalam mendefinisikan hubungan *input output* dalam tingkah laku dari institusi finansial (termasuk perbankan) adalah : (i) Pendekatan produksi (*the production approach*), (ii) Pendekatan intermediasi (*the intermediation approach*), dan (iii) Pendekatan aset (*the asset approach*). Pendekatan produksi melihat institusi finansial sebagai produser dari akun deposit (*deposit accounts*) kredit pinjaman (*loans*); mendefinisikan *output* sebagai jumlah dari akun-akun tersebut atau dari transaksi transaksi yang terkait. Pendekatan intermediasi memandang sebuah institusi finansial sebagai intermedator: merubah dan mentransfer aset-aset finansial dari unit-unit *surplus* menjadi unit-unit defisit. Yang terakhir adalah pendekatan aset. Pendekatan ini melihat fungsi primer sebuah institusi finansial sebagai pencipta kredit pinjaman (*loans*), dimana *output* benar-benar didefinisikan dalam bentuk aset-aset.

c. Konsep Efisiensi dalam Islam

Tujuan efisiensi adalah untuk mencapai keuntungan optimal. Dalam Islam istilah efisiensi tidak dikenal. Menekan biaya yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang paling maksimal dalam teori produsen akan berakibat pada perbuatan *dzalim* yang tidak bersenyawa dengan ruh Islam. Dalam Islam, perwujudan keuntungan yang optimal dihasilkan melalui usaha yang optimal (kerja keras) untuk menghasilkan sesuatu secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan (*ta'adul*) dan etika syariah. Keuntungan yang dihasilkan harus seimbang dengan kerja keras dan beban yang dikeluarkan. Rasulullah saw dalam Khan (2008) bersabda, *Al-Kharaj bid-Dhaman* (setiap keuntungan yang didapatkan harus sesuai dengan beban yang dikeluarkan). Keseimbangan juga berarti bahwa dalam mewujudkan *value added*, produsen mesti memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mewujudkan optimalisasi dan keseimbangan, Islam memberikan beberapa *guidance*, di antaranya:

1. Memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam Islam menghendaki umatnya untuk bekerja memakmurkan bumi dan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam. Allah berfirman:

“...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya..” (Hud : 61)

2. Spesialisasi kerja. Konsep spesialisasi kerja pernah diutarakan oleh Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya. Menurutnya dengan jumlah penduduk yang semakin besar, maka akan terjadi pembagian dan spesialisasi tenaga kerja sehingga akan memperbesar *surplus* dan perdagangan internasional. Pembagian tenaga kerja internasional akan lebih tergantung pada perbedaan keahlian dan keterampilan penduduk dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya alam. Dalam Islam, prinsip dasar tentang spesialisasi dapat ditelaah dalam hadits Nabi saw yang menjelaskan tentang konsep *itqan* dan *ihsan*. Mengenai *itqan*, Rasulullah saw bersabda: Artinya,

“Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan (berproduksi) dengan cermat dan tekun (*itqan*)” (HR. Thabrani).

3. Larangan terhadap Riba. Salah satu cara Islam mewujudkan efisiensi dengan cara minimalisasi biaya produksi adalah dengan pengharaman riba

(bunga). Sebagai bagian dari elemen biaya tetap dalam produksi, penghapusan bunga akan membuat biaya produksi lebih rendah (efisien).

4. Larangan *israf* dan *tabdzir* dalam produksi. Perbedaan antara *israf* dan *tabdzir* disampaikan oleh Al-Mawardi dalam Kantakji (2003). Al-Mawardi menjelaskan bahwa *israf* adalah kesalahan menggunakan takaran yang tepat, sedangkan *tabdzir* adalah kebodohan dalam menggunakan alokasi yang tepat. Allah berfirman:

“Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih lebihan.” (al- An’am :141)

d. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Serta menawarkan jasa keuangan lain seperti : simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain lain berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi aturan aturan yang sudah ditetapkan oleh dewan syariah nasional. Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam yang harus diterapkan dalam perilaku investasi lembaga keuangan syari’ah dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain:

Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibagi menjadi tiga yaitu:

1. lembaga formal seperti bank desa dan koperasi,
2. lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah, dan
3. sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang.

Sementara itu LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu

1. LKM formal, baik bank maupun non bank,
2. LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak,
3. LKM yang dibentuk melalui program pemerintah dan
4. LKM informal seperti rentenir ataupun arisan.

Adapun BI hanya membagi LKM menjadi 2 kategori saja yaitu

1. LKM yang berwujud bank dan
2. LKM yang berwujud non bank. Lembaga-lembaga keuangan non bank terdiri dari lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang simpan pinjam,

pegadaian, asuransi, pegadaian syari'ah, lembaga zakat, pasar modal syari'ah.

Lembaga keuangan mikro syari'ah adalah lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya berdasarkan syari'ah. Adapun prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual-beli, sewa (*ijarah*), dan titipan (*wad'iah*).

e. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah

1. Prinsip At Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah ayat 2 : *"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya"*.
2. Prinsip menghindari Al-Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat An Nisa' ayat 2 : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"*
3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan yang dianut Lembaga Keuangan Syari'ah a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba). Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram) Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian)

f. Bentuk-bentuk lembaga keuangan Syari'ah

Bentuk-bentuk lembaga keuangan Syari'ah antara lain :

1. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ),
Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.
3. Lembaga Pengelola Wakaf
Badan wakaf bertugas untuk selalu melakukan kerjasama dalam memeriksa tujuan peraturan dan program. Disamping itu badan wakaf juga

bertugas untuk mengusut dan melaksanakan semua pendistribusian (wakaf) serta semua kegiatan perwakafan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Badan wakaf juga untuk menguasai pengelolaan wakaf dan mempunyai wewenang untuk membelanjakan dengan sebaik-baiknya

4. BMT/UJKS

UJKS adalah Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada koperasi syari'ah adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola bagi hasil (syari'ah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan (Fatwa MUI,2011).

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah

Kajian Terdahulu

Purwantoro (2005) mencoba menilai tingkat produktivitas lembaga pembiayaan mikro dengan menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* dengan orientasi *input* maupun *output*. Objek observasi adalah seluruh institusi lembaga pembiayaan mikro dari 10 provinsi di Indonesia, yaitu Jakarta, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. Datayang digunakan adalah data tahunan untuk periode 1998-2001 (serta data 2003 untuk jumlah institusi pembiayaan mikro). Variabel *input* dan *output* yang digunakan adalah unit BRI 2003, BPR 2003, BKD 2003, jumlah lembaga keuangan ilegal pada tahun 1998. Sementara variabel *output* yang dipakai adalah jumlah pekerja tahun 1998 dan nilai kotor jutaan rupiah tahun 1998. Hasil pengolahan data menunjukkan, bahwa daerah-daerah selain DKI Jakarta, Maluku dan Irian Jaya menunjukkan *trend* kinerja yang menurun setelah melewati tahun 2000 jika menggunakan pendekatan CCR yang mengasumsikan *constant return to scale*. Sementara jika menggunakan pendekatan BCC dengan asumsi *variabel return to scale* yang relatif tidak 'seketat' pendekatan CCR, maka hanya daerah Jawa Tengah, Bali dan Nusa Tenggara yang menunjukkan *trend* menurun setelah tahun 2000, selebihnya menunjukkan *trend* stabil pada tingkat efisiensi dan efektifitas 100%.

Ascarya dan Yumanita (2009) mencoba menganalisis efisiensi BPRS di Indonesia selama periode 2003-2006. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis

intermediasi BPRS. Pendekatan yang digunakan adalah *Two Stage Data Envelopment Analysis*, yaitu pendekatan pengukuran efisiensi yang dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama, mengukur efisiensi BPRS dan tahap kedua adalah menguji faktor-faktor baik internal dan eksternal yang mempengaruhi nilai efisiensi, dengan menggunakan pendekatan Tobit Variable *input* yang digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi BPRS adalah aktiva tetap/inventaris, dana pihak ketiga dan biaya tenaga kerja. Sementara variable *output* yang digunakan adalah pembiayaan yang diberikan dan pendapatan lainnya (diluar pendapatan margin dan bagi hasil). Adapun faktor internal yang diuji pengaruhnya terhadap nilai efisiensi adalah ukuran bank, kekuatan modal. Sedangkan faktor eksternal adalah tingkat pendapatan masyarakat setempat, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan ukuran BPR sebagai pesaing. Dari hasil pengukuran DEA diperoleh hasil bahwa rata-rata nilai efisiensi BPRS masih rendah, dan penyebab ketidakefisienannya adalah kurang optimalnya BPRS dalam memanfaatkan *input* yang ada untuk menghasilkan *output*, yaitu pendapatan operasional lainnya yang berpotensi untuk ditingkatkan, tanpa melepaskan fungsi BPRS yang sesungguhnya dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif. Sementara faktor internal yang mempengaruhi kinerja BPRS adalah kapasitas modal, dan faktor eksternal adalah pertumbuhan pendapatan penduduk, pertumbuhan kredit BPR, pertumbuhan pengangguran, dan jumlah penduduk yang lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Awal (SLTA)

Penelitian The Asia Foundation dengan judul *Microfinance Service in Indonesia : Survey of Institutions in 6 Provinces* mengkaji lembaga keuangan bank dan lembaga non bank, termasuk Baitul Maal Wat Tamwil yang ada di daerah Bandung, Madiun, Pontianak, Samarinda, Manado dan Jayapura. Fokus kajian diantaranya adalah mengevaluasi kapabilitas lembaga keuangan mikro disejumlah wilayah di Indonesia. Kapabilitas yang dimaksud dalam kajian ini meliputi efisiensi, *sustainability* dan *ability*, terutama kemampuan dalam pengembangan jaringan pelayanan dan kemampuan lembaga keuangan mikro dalam mengembangkan jaringan kelembagaan yang luas (The Asia Foundation, 2003).

Promotion of Small Financial Institution (ProFi) mengungkapkan bahwa sistem keuangan mikro di Indonesia saat ini memiliki masalah-masalah antara lain: (1) jangkauan; (2) kerangka legal; hanya ada dua jenis Lembaga Keuangan

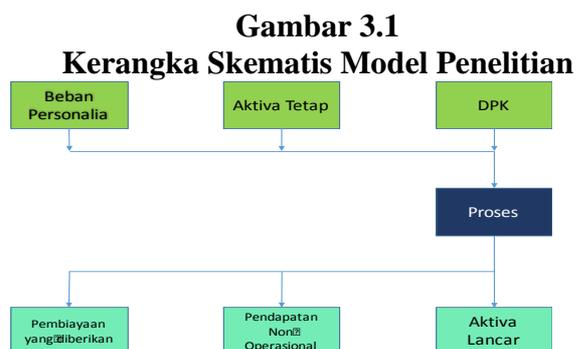
Mikro yaitu BPR dan koperasi yang diakui secara legal; (3) regulasi dan supervisi: ketiadaan regulasi dan supervisi bagi Lembaga Keuangan Mikro yang bukan BPR maupun koperasi; 4) struktur dukungan: ketiadaan rerangka legal yang cukup mengakibatkan tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab dalam hal regulasi, supervisi, dan dukungan terhadap Lembaga Keuangan Mikro selain BPR dan koperasi (ProFI, 2005).

Hasil penelitian Campion menyimpulkan bahwa komersialisasi industri keuangan mikro menghadapi beberapa hambatan yaitu: 1) subsidi yang tidak tepat; 2) regulasi dan pengawasan yang buruk; 3) hanya sedikit Lembaga Keuangan Mikro yang mampu mengumpulkan tabungan dari masyarakat; 4) kapasitas manajemen yang terbatas; 5) belum efisien secara kelembagaan; 6) memerlukan penguasaan metode keuangan mikro yang lebih baik untuk daerah perdesaan dan sektor pertanian. (Campion, 2002). Keadaan ini menyebabkan tingkat keberlanjutan usaha atau *sustainability* Lembaga Keuangan Mikro maupun program keuangan mikro menjadi rendah. Hanya beberapa Lembaga Keuangan Mikro yang mampu bertahan dan bersaing baik dengan sesama Lembaga Keuangan Mikro maupun jenis layanan perbankan yang lebih modern

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di provinsi Riau. Terpilihnya Provinsi Riau dalam penelitian ini dikarenakan perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di provinsi Riau cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan pengukuran efisiensi kinerja pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah agar mampu memiliki daya saing dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Intermediasi dalam menghitung efisiensi lembaga keuangan mikro syariah. Adapun Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: (Jemric & Vujcic, 2002)

Variabel *input* dan ouput yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada variable variable yang digunakan dalam penelitian Jemric-Vujcic (Jemric & Vujcic, 2002). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

Variabel Input : merupakan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga keuangan mikro syariah untuk mendukung kinerja lembaga keuangan mikro syariah yang tercermin dari laporan keuangannya yaitu : Beban Personalia (X1), Aktiva Tetap (X2) dan Dana Pihak Ketiga (X3).

Variabel Output merupakan pendapatan lembaga keuangan mikro Syariah dari kegiatan operasionalnyam yaitu : Pembiayaan yang diberikan (Y1), Pendapatan non operasional (Y2) dan Aktiva Lancar (Y3)

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh BPRS di Provinsi Riau. Sampai dengan akhir tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah BPRS yang ada di Provinsi Riau berjumlah 2 BPRS, yaitu BPRS Hasanah (Kota Pekanbaru) dan BPRS Berkah Dana Fadillah (Kabupaten Kampar). Sampel dari penelitian ini mengambil seluruh populasi sehingga menggunakan metode survey. Waktu pengamatan atau pengukuran efisiensi dilakukan mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan masing-masing Lembaga keuangan Mikro Syariah. Data sekunder yang dibutuhkan antara lain: Jumlah Simpanan, Beban Operasional, Jumlah pembiayaan, Pendapatan Operasional dan Jumlah Kas.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode yang menghimpun informasi dan data melalui studi pustaka dan eksplorasi literature-literatur dan laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga keuangan mikro syariah.

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dalam mengukur nilai efisiensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Data Envelopment Analysis* (DEA) yaitu alat analisis yang didasari teknik programasi linear untuk mengukur efisiensi relative dari sekumpulan Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang dapat dibandingkan. Metode ini merupakan prosedur yang dirancang secara khusus untuk mengukur efisiensi relative yang menggunakan banyak input dan banyak output, dimana penggabungan input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan.

Dalam analisis DEA, efisiensi dinyatakan dalam rasio antara total input dengan total output tertimbang. Dimana setiap unit kegiatan ekonomi diasumsikan bebas menentukan bobot untuk setiap variable input maupun variable output yang ada, asalkan mampu memenuhi dua kondisi yang disyaratkan yaitu (Lendro Kurniawan, 2005) : (1) Bobot tidak boleh negative dan (2) Bobot harus bersifat universal atau tidak menghasilkan indicator efisiensi yang di atas normal atau lebih dari nilai 1, bilamana dipakai unit kegiatan ekonomi yang lainnya. Angka efisiensi yang diperoleh dengan model DEA memungkinkan untuk mengidentifikasi unit kegiatan ekonomi yang penting diperhatikan dalam kebijakan pengembangna kegiatan ekonomi yang dijalankan secara kurang produktif. Pengolahan data menggunakan Software *Banxia Frontier Analyst*

Pembahasan

a. Efisiensi Constant Return to Scale (CSR)

Model *constant return to scale* dikembangkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (Model CCR) pada tahun 1978. Model ini mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan *input* dan *output* adalah sama (*constant return to scale*). Artinya, jika ada tambahan *input* sebesar x kali, maka *output* akan meningkat sebesar x kali juga. Asumsi lain yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan atau unit kegiatan ekonomi (UKE) beroperasi pada skala yang optimal. UKE yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti *inefisiensi* sedangkan UKE yang nilai efisiensinya sama dengan 1 berarti UKE tersebut efisien.

Table 4.1. menunjukkan tingkat efisiensi CSR dari lembaga keuangan mikro syariah. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode DEA yang berasumsikan Constant Return to scale (CSR), dapat dilihat tingkat efisiensi teknik dari Lembaga keuangan mikro Syariah. BPRS Hasanah pada tahun 2010, 2011, 2013 dan 2017 memiliki score efisiensi 1 yang berarti BPRS Hasanah telah menjalankan kegiatan ekonominya secara efisien. Efisiensi terendah yang dialami oleh BPRS Hasanah terjadi pada tahun 2012 dimana nilai efisiensi sebesar 0,80. Penyebab inefisiensi pada BPRS Hasanah pada tahun 2012 disebabkan oleh kelebihan input pada beban personalia serta kurangnya output pada pembiayaan yang diberikan.

Tabel 4. 1
Efisiensi CSR Lembaga Keuangan Mikro Syariah

No.	Unit Kegiatan Ekonomi (UKE)	CRS Efficiency
1	HASANAH 2017	1.00000
2	BERKAH DANA FADILLAH 2017	1.00000
3	HASANAH 2016	0.91096
4	BERKAH DANA FADILLAH 2016	0.97418
5	HASANAH 2015	0.96885
6	BERKAH DANA FADILLAH 2015	0.78817
7	HASANAH 2014	0.83395
8	BERKAH DANA FADILLAH 2014	0.78170
9	HASANAH 2013	1.00000
10	BERKAH DANA FADILLAH 2013	0.75634
11	HASANAH 2012	0.80452
12	BERKAH DANA FADILLAH 2012	0.62855
13	HASANAH 2011	1.00000
14	BERKAH DANA FADILLAH 2011	0.96507
15	HASANAH 2010	1.00000
16	BERKAH DANA FADILLAH 2010	0.99302

Sumber: Olah data DEA 2018

Sementara BPRS Berkah Dana Fadillah hanya pada tahun 2017 memiliki score 1, yang berarti pada tahun 2017 BPRS Berkah Dana Fadillah menjalankan kegiatan Ekonominya secara efisien. Efisiensi terendah pada BPRS Berkah Dana Fadillah terjadi pada tahun 2012 dengan score efisiensi sebesar 0,62. Penyebab infisiensi pada BPRS Berkah Dana Fadillah pada tahun 2012, juga dikarenakan oleh kelebihan input pada beban personalia dan aktiva tetap yang tidak diimbangi dengan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

b. Efisiensi Variable Return to Scale (VRS)

Model ini dikembangkan oleh Banker, Charnes, dan Cooper (model BCC) pada tahun 1984 dan merupakan pengembangan dari model CCR. Model ini beranggapan bahwa perusahaan tidak atau belum beroperasi pada skala yang optimal. Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan *input* dan *output* tidak sama (*variable return to scale*). Artinya, penambahan *input* sebesar *x* kali tidak akan menyebabkan *output* meningkat sebesar *x* kali, bisa lebih kecil atau lebih besar dari *x* kali. Nilai dari efisiensi tersebut selalu kurang atau sama dengan 1. UKE yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti *inefisiensi* sedangkan UKE yang nilainya sama dengan 1 berarti UKE tersebut efisien.

Tabel 4.2.
Efisiensi VSR Lembaga Keuangan Mikro Syariah

No.	Unit Kegiatan Ekonomi (UKE)	VRS Efficiency
1	HASANAH 2017	1.00000
2	BERKAH DANA FADILLAH 2017	1.00000
3	HASANAH 2016	0.95011
4	BERKAH DANA FADILLAH 2016	1.00000
5	HASANAH 2015	0.98186
6	BERKAH DANA FADILLAH 2015	1.00000
7	HASANAH 2014	0.89344
8	BERKAH DANA FADILLAH 2014	0.95347
9	HASANAH 2013	1.00000
10	BERKAH DANA FADILLAH 2013	0.85787
11	HASANAH 2012	0.89505
12	BERKAH DANA FADILLAH 2012	0.80423
13	HASANAH 2011	1.00000
14	BERKAH DANA FADILLAH 2011	1.00000
15	HASANAH 2010	1.00000
16	BERKAH DANA FADILLAH 2010	1.00000

Sumber : Olah data DEA 2018

Table 4.2. menunjukkan tingkat efisiensi VRS dari lembaga keuangan mikro syariah. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode DEA yang berasumsikan *Variable Return to scale* (VSR), dapat dilihat tingkat efisiensi teknik dari Lembaga keuangan mikro Syariah. BPRS Hasanah pada tahun 2010, 2011, 2013 dan 2017 memiliki score efisiensi 1 yang berarti BPRS Hasanah telah menjalankan kegiatan ekonominya secara efisien. Efisiensi terendah yang dialami oleh BPRS Hasanah terjadi pada tahun 2012 dan 2014 dimana nilai efisiensi sebesar 0,89. Sementara BPRS Berkah Dana Fadillah pada tahun 2010, 2011,2015,2016 dan 2017 memiliki score 1, yang berarti pada tahun-tahun tersebut BPRS Berkah Dana Fadillah menjalankan kegiatan Ekonominya secara efisien. Efisiensi terendah Berkah Dana Fadillah terjadi pada tahun 2012 dengan score efisiensi sebesar 0,80.

c. Target Input dan Output Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dapat memberi arahan strategis bagi pihak manajemen untuk meningkatkan efisiensi suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Melalui pengenalan terhadap input yang terlalu banyak digunakan serta output yang dihasilkan terlalu rendah, maka pihak manajemen dari lembaga keuangan mikro syariah dapat mengetahui seberapa besar tingkat input dan output yang harus disesuaikan agar lembaga keuangan mikro syariah ini dapat memiliki tingkat efisiensi yang tinggi.

Tabel 4.3
Target Input dan Output Lembaga Keuangan Mikro Syariah

UKE	Variabel	Actual	Target	To Gain	To Achieved	
Hasanah 2012	input	Beban Personalia	538,863	433,525	19.5%	80.5%
		Aktiva Tetap	391,011	314,575	19.5%	80.5%
		DPK	124,385	100,070	19.5%	80.5%
	Output	Pembiayaan yang diberikan	4,422,547	4,422,547	0.0%	100.0%
		Pendapatan non operasi	18,179	18,179	0.0%	100.0%
		Aktiva Lancar	6,561,177	6,795,137	-3.6%	103.6%
UKE	Variabel	Actual	Target	To Gain	To Achieved	
BDF 2012	input	Beban Personalia	1,366,528	858,935	37.1%	62.9%
		Aktiva Tetap	1,107,130	695,890	37.1%	62.9%
		DPK	810,273	509,299	37.1%	62.9%
	Output	Pembiayaan yang diberikan	9,770,921	9,770,921	0.0%	100.0%
		Pendapatan non operasi	5,488	5,488	0.0%	100.0%
		Aktiva Lancar	14,884,966	15,108,352	-1.5%	101.5%

Sumber: Olah Data 2018

Peningkatan efisiensi BPRS Hasanah dapat dilakukan dengan cara mengurangi beban personalia, Aktiva Tetap dan Dana Pihak Ketiga saat ini sebesar 19,5%. Kemudian menetapkan target aktiva lancar sebesar 3,6%. Sementara peningkatan efisiensi pada BPRS Berkah Dana Fadillah dapat dilakukan dengan cara mengurangi beban personalia, aktiva tetap dan dana pihak ketiga sebesar 37,1%, kemudian menetapkan target aktiva lancar sebesar 1,5%.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode DEA yang berasumsikan Constant Return to scale (CSR), diketahui bahwa BPRS Hasanah pada tahun 2010, 2011, 2013 dan 2017 memiliki score efisiensi 1 yang berarti BPRS Hasanah telah menjalankan kegiatan ekonominya secara efisien. Sementara pada BPRS Berkah Dana Fadillah hanya pada tahun 2017 memiliki score efisiensi 1 yang berarti BPRS Berkah Dana Fadillah telah menjalankan kegiatan ekonominya secara efisien. Efisiensi terendah yang dialami oleh BPRS Hasanah dan BPRS Berkah Dana Fadillah terjadi pada tahun 2012 dimana nilai efisiensi sebesar 0,80 dan 0,62.

Penyebab inefisiensi pada BPRS Hasanah pada tahun 2012 disebabkan oleh kelebihan input pada beban personalia serta kurangnya output pada pembiayaan yang diberikan. Penyebab inefisiensi pada BPRS Berkah Dana Fadillah pada tahun 2012, juga dikarenakan oleh kelebihan input pada beban personalia dan aktiva tetap yang tidak diimbangi dengan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Daftar Pustaka

- Agung, Wahyu Dwi. 2016. *Bisnis Keuangan Mikro di Indonesia (Analisis Posisi dan Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Disertasi, Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah.
- Ali. M. Mahbubi dan Ascarya. 2010. "Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri)", *TAZKIA Islamic Finance and Business Review*, Vol.5, No.2, Agustus – Desember
- Ascarya dan Yumanita, Diana. 2009. *Analisis Efisiensi Intermediasi Bank Perkreditan Syariah di Indonesia: Pendekatan Two Stage DEA*, Draft. Jakarta: PPSK Bank Indonesia.

- Ascarya, & Yumanita, D. 2006. Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia dengan Data Envelopment Analysis. *TAZKIA Islamic Finance and Business Review*, 1(2), 1–28. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Coelli, T.J, Rao, D.S.P., Prasada Rao, Christopher J. O’Donnell and G.E. Battese (2005), *Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*, (Second Edition), Kluwer Academic Publishers, Boston Ferdian,
- Jemric, I., & Vujcic, B. 2002. Efficiency of Banks in Croatia: A DEA Approach. *Comparative Economic Studies*, 44(2–3), 169–193 <https://doi.org/10.1057/ces.2002.13>
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu. 2009. *Profil BMT UGT Sidogiri, Jalan Hijrah Menuju Ekonomi Syariah*, Pasuruan: BMT UGT Sidogiri
- Mediadianto, Arief. 2007. Efisiensi Bank Syariah dan Konvensional Dengan Metode DEA, Tesis Magister pada Universitas Indonesia Depok
- Molina, Helen. 2008. Perbandingan Efisiensi Perbankan Konvensional Terhadap Perbankan syariah di Indonesia, Tesis Magister pada Universitas Indonesia Depok
- Reza, Ilham. 2006. *Analisis Efisiensi Perbankan Unit Usaha Syariah dengan Menggunakan Metode DEA dan ROA*, Skripsi Sarjana Ekonomi pada Departemen Manajemen FEUI Depok
- Santoso, Gempur. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zubair, Muhammad KaMaal. 2016. “Analisis Faktor-faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *IQTISHADIA*, Vol 9, No. 2, 2016.